



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT  
NOMOR: W.33 -04.OT.03.03 Tahun 2024**

**TENTANG  
TIM VERIFIKATOR  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Verifikator Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Verifikator Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN 2024;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor: W.33-29.OT.03.03 Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Tim Verifikator Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, dan Menetapkan Tim Verifikator Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikator Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

1. Melakukan pemeriksaan pengunggahan data dukung satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
2. Melaporkan kelengkapan data dukung yang diupload satuan kerja ke Tim Penilai Internal;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal 01 Januari 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
MARASIDIN  
NIP 196404251990011001

Tembusan:

- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

**TIM VERIFIKATOR  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI BARAT**

Ketua Tim : Kepala Divisi Administrasi

Wakil Ketua Tim : Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Sekretaris : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Anggota :

No.	Satuan Kerja	Nama Verifikator	Kontak Verifikator
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	1. Ida Mashita 2. Satriyana	1. 082346454845 2. 081271935511
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali	1. Rosa Dwi Fanani 2. Sahfrida Tambunan	1. 085648347265 2. 082276797965
3	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	1. Totok Sugiarto 2. Else Estika	1. 085647565170 2. 085299449994
4	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	1. Andi Kadir 2. Rizal Harmawan Samauna	1. 082188990798 2. 082187601611
5	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju	1. Mitra Bangsawan Mukhtar 2. Tri Rezki Dermawan	1. 081354965111 2. 085333233306
6	Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali	1. Nurhadi 2. Sitti Ira Arman	1. 085756009007 2. 08114205303
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene	1. Ramli R. 2. Achmad Fauzie Azis	1. 085210443106 2. 085242025691
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju	1. Muhammad Aldi Wiratama 2. Reynelda Simamora	1. 085758163144 2. 081378889370
9	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu	1. M. Alim B. 2. Jaka JN Firdiansyah	1. 082346735562 2. 082347028405
10	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa	1. Romilda Daniel 2. Ramlah	1. 08114229963 2. 081341055323
11	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju	1. Ahmadi 2. Waode Maya Harmi	1. 08117672154 2. 082187802221
12	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju	1. Rian Orlando Lumbangaol 2. Nurdiana	1. 085206559386 2. 085261366039



Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal 01 Januari 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**MARASIDIN**  
NIP 19640425199001001